

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kendala serius yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah adalah masalah penyaluran kredit. Meskipun secara nasional jumlah lembaga keuangan dan volume kredit mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, namun penyaluran kredit ke daerah pedesaan masih banyak mengalami hambatan. Dari seluruh volume kredit nasional, diperkirakan hanya sekitar 5 persen yang mengalir ke daerah pedesaan.¹

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi.²

“Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan”.

¹ Revisond, baswir, *agenda ekonomi kerakyatan*, yogyakarta, pustaka pelajar, 1997, hal.29.

² Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33

Sistem dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang, khususnya di negara-negara teluk sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* (menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan.³

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah Air tidak bisa di lepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah, BMT, LKS sejenis). Kedudukan LKSM yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga non bank lainnya seperti BMT dan Koperasi Pesantren, sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah.⁴

Bersamaan dengan fenomena bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga

³ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm. 1

⁴ *ibid* hlm. 79

keuangan seperti perbankan, asuransi dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).⁵ Lembaga-lembaga syari'ah ini muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat Islam yang di dalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al-mal* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Di samping itu, munculnya lembaga-lembaga syari'ah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga bank dengan riba.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah tersebut diatas adalah sebuah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang sering disebut juga sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ini merupakan suatu lembaga terpadu yang memadukan antara Baitul Maal sebagai lembaga Sosial dan Baitul Tamwil sebagai lembaga Bisnisnya. Lembaga yang mempunyai badan hukum koperasi ini sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang intinya koperasi yang pengelolaannya menggunakan pola syariah.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

⁵ Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah); Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 43

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁶

Disamping kegiatan menabung, BMT juga menerima transaksi titipan zakat, infaq dan sedekah sekaligus menyalurkan transaksi tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Pengertian Baitul Maal wa Tamwil sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau UKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Peran BMT dalam pemberdayaan UKM akan mampu menopang kehidupan masyarakat, serta mampu meningkatkan produksi lokal dalam negeri hasil dari UKM tersebut. Menurut Ketua Panitia Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 13-17 Mei 2009 Dedi Mulyadi berpendapat pemberdayaan produk dalam negeri sebagai upaya khusus agar dampak krisis global tidak semakin meluas.

⁶ A. Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 183

Sedangkan Menurut Boediono yang pernah menjadi Gubernur BI mengatakan pengusaha mikro kecil menengah merupakan pilar ekonomi nasional.⁷

Keberadaan BMT di masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.⁸

Dengan demikian keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil. Khususnya di daerah dan sekitarnya terdapat usaha kecil yang berprospek bagus seperti di daerah Demak.

Namun ada juga pengusaha kecil daerah demak yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka karena keterbatasan modal. Melalui BMT BIMA diharapkan

⁷ Republika, 29 april 2009

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 85

pembiayaan yang diberikan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan memandirikan ekonomi usaha kecil khususnya di daerah Demak dan sekitarnya.

Pada awal berdirinya BMT BIMA bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum dan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah (pedagang), petani, pegawai dan rekan-rekan koperasi dan juga menjadi perantara dan kerjasama antara *aghniya* (pemilik harta) dengan *mudhorib* (pelaksana usaha) secara konsisten berperan aktif dalam pembangunan nasional.⁹

Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa perbankan terutama bagi usaha kecil dan menengah, perlu di berikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan baitul maal wat tamwil (BMT BIMA), dengan harapan mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan operasionalnya, BMT BIMA Di Kabupaten Demak memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pedeketan-pendekatan, mengingat penyebaran penduduk di kabupaten Demak yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang

⁹ Sumber dokumentasi BMT BIMA Demak

pekerjaanya, didalam penyaluran pembiayaannya BMT BIMA Di Kabupaten Demak lebih banyak memberikan kepada usaha kecil di antaranya pedagang-pedagang kecil yang tersebar di wilayah Demak para petani dan usaha-usaha kecil lainnya.¹⁰

Dari hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaanya masih banyak peluang untuk memberikan pembiayaan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan usaha kecil khususnya di Kabupaten Demak. Maka dengan adanya BMT BIMA melalui pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat di harapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat dari jerat kemiskinan.

Para pedagang kecil yang tinggal di desa dan tergolong ekonomi lemah, seperti di Kecamatan Demak yang berkuat di sektor UKM dan petani. Kehadiran BMT BIMA sangat diharapkan untuk kebutuhan ekonomi dan pengembangan usahanya. Selain itu, sektor UKM akan membawa dua implikasi signifikan yang berdampak langsung bagi tersedianya lapangan pekerjaan yaitu mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Kondisi obyektif UKM yang ada di Kecamatan Demak sebelum adanya BMT sudah baik, karena banyak lembaga keuangan yang berdiri sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan komposisi pembiayaan UKM di Kecamatan Demak sebelum BMT BIMA berdiri yaitu 17.670 dan setelah

¹⁰ Wawancara dengan bapak arifin selaku manajer BMT BIMA pada tanggal 8 maret 2012

BMT BIMA berdiri UKM yang terdata 26.400 maka menjadi lebih baik, karena semakin banyak pilihan lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat. Saat ini dana yang disalurkan oleh BMT BIMA untuk plafon pemberdayaan UKM melalui pembiayaan Usaha Kecil mencapai Rp 2.000.000.000, dengan perkembangan mulai tahun 2009 – 2011 mencapai kenaikan 50%. Nominal pinjaman dana yang diberikan untuk pembiayaan UKM dari Rp 1.000.000 – Rp 150.000.000 dilihat dari hasil survei lapangan dan jenis usaha yang dimiliki nasabah.¹¹

Sebagian besar dari pembiayaan yang di berikan BMT BIMA kepada pengusaha kecil berdampak positif terhadap perekonomian pengusaha tersebut, pengusaha kecil yang mulanya kesulitan modal sekarang dengan adanya pembiayaan dari BMT BIMA mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas penulis tertarik dalam penulisan ini dengan membahas masalah: **“Peran BMT BIMA Dalam Memberikan Pembiayaan Pada Usaha Kecil Di Kabupaten Demak”**

¹¹Wawancara dengan Saudari fitriah selaku bagian accounting tgl 2 april 2012

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA Kabupaten Demak kepada usaha kecil di Kabupaten Demak?
2. Bagaimanakah peran pembiayaan BMT BIMA dalam peningkatan usaha kecil di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tahapan pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA Kabupaten Demak kepada usaha kecil di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui peranan pembiayaan BMT BIMA kaitannya dengan peningkatan usaha kecil di Kabupaten Demak..

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini mendapat kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang baitul maal waa tamwil.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk menambah wawasan baru dalam memahami proses pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan BMT BIMA Kabupaten Demak.
 - b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang

di lalui dalam rangka pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA Kabupaten Demak khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi pemberdayaan UKM. Berbagai buku dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Euis Amalia dalam buku *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: RajaGravindo Persada, 2009). Menguraikan kritik singkatnya terhadap pemikiran ekonomi konvensional yang absolut dan menolak *Smithian neociassial economics* yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu ekonomi yang berpaham kebangsaan dan kerakyatan yang menentang sistem ekonomi pasar bebas neoklasikal yang kapitalis-liberalis, yang saat ini secara status quo mendominasi pengajaran ilmu ekonomi. Dengan kata lain pengarang buku ini menempatkan ekonomi syariah yang menjadi objek studinya.

Penelitian skripsi Nursalim (Medan: FE-USU 2010), *“Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”*. Menyatakan bahwa PNPM Mandiri merupakan suatu jalan alternatif bagi masyarakat untuk bisa lebih aktif dalam mengembangkan

potensi diri, dan memperbaiki perekonomian keluarga. Dengan adanya PNPMM Mandiri ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian yang ada di Desa masing-masing. Sehingga Usaha Kecil dan Menengah masyarakat Desa, dapat berjalan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa baik dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia yang ada di Desa.

Penelitian Aguanita (Malang: FT-UIN 2008) "*Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa'adah Malang*". Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan konsep pemberdayaan pengusaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan BMT Assa'adah Malang adalah mengembang investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM serta menjadi penghubung antar UKM dengan Bank. BMT juga mengembangkan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan memberikan pembiayaan karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan modal kecil.

Penelitian Anang Maulana, (Malang: FT-UIN 2010) "*Peran dan Fungsi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Ditinjau dari UU no.21 Tahun 2008*". Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut. Langkah pertama

dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventerisasi peraturan yang berkaitan dengan fungsi perbankan syariah dalam meningkatkan usaha mikro ditinjau dari UU NO..21 Th.2008, perekonomian domestik semakin meningkat terutama disaat terjadi krisis. Perbankan syariah sebagai bukti bahwa yang menghendaki gerak interaktif dinamis yang berimbang secara struktural dengan sistem keadilan bagi umat Islam dalam menghadapi perbankan konvensional yang dijalankan selama ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹² Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti peranan pembiayaan BMT BIMA terhadap peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.¹³ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115

¹³ *Ibid*, hlm. 115

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Data ini diperoleh langsung dari wawancara anggota BMT.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

¹⁵ *Ibid* hlm. 92

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di BMT BIMA untuk mencari data nasabah pembiayaan UKM yang berkaitan disalurkan oleh BMT dari tahun 2009 - 2011.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.¹⁷ Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap penyaluran pembiayaan UKM BMT BIMA di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.¹⁸

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm.46

¹⁸ Rianto Adi, *Op. Cit.*, hlm. 61.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁹ Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.²⁰

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

²⁰ *Ibid*, hlm. 210.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami materi skripsi yang ditulis, maka penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan. Bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II akan memaparkan tinjauan umum yang mendasari tentang profil BMT, pengertian BMT, dan pemberdayaan UKM .

Bab III akan memaparkan keberadaan BMT BIMA Demak dan aktivitas nasabahnya. Bab ini akan memotret kondisi umum masyarakat Demak yang ditinjau dari beberapa segi. Kemudian profil BMT BIMA dan ragam produk dan operasionalnya. Setelah itu akan digambarkan aktivitas ekonomi nasabah BMT BIMA Demak .

Bab IV merupakan analisis. Analisis ini penekanannya pada sistem operasional BMT BIMA Demak, kemudian aktivitas ekonomi nasabah BMT BIMA Demak kaitannya dengan peningkatan usaha kecil.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.